

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BONTODURI  
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

*COMMUNITY PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF SLUMS IN  
BONTODURI VILLAGE TAMALATE SUBDISTRICT MAKASSAR CITY*

**IKRAM MUBARAK DJODDING**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BONTODURI  
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

IKRAM MUBARAK DJODDING

kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



**TESIS****PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATEA  
KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**IKRAM MUBARAK DJODDING**  
Nomor Pokok P0221812006

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 23 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

  
Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS  
Ketua

  
Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si  
Anggota

Ketua Program Studi  
Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin,  
Dekan Sekolah Pascasarjana

  
Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

  
Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKRAM MUBARAK DJODDING

Nomor Mahasiswa : P022182006

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2020  
Yang menyatakan,



IKRAM MUBARAK DJODDING



## PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar". Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, sehingga saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi karya ilmiah selanjutnya yang lebih baik. Semoga apa yang saya laksanakan dalam penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini yang hanya berkat bantuan berbagai pihak maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis hanturkan dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng. selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

Prof. Ir. Hazairin Zubair, MS. selaku ketua komisi penasehat dan Dr. Ir. Ahmadanih, M.Si selaku anggota komisi penasehat, terima kasih atas



segala bantuan dan keikhlasannya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan saran sejak awal penulisan tesis hingga selesai.

3. Tim komisi penguji Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT, Dr. Kurniaty, S.E, M.Si, Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan tesis ini.
4. Ayahanda tercinta Djodding Katu, S.Pd., ibunda tercinta Nursyamsuriani dan seluruh keluarga terima kasih atas segala doa, motivasi dan kasih sayang serta materi yang diberikan kepada penulis.
5. Saudara(i) saya, Zulhadillah Dj, Ikmal Dj, Dana Aulya, Salwa dan Dwi Aras Pancarany yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi untuk selalu lebih semangat.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas bantuannya.

Makassar, Mei 2020

Penulis



## ABSTRAK

**IKRAM MUBARAK DJODDING, 2020.** *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar* (dibimbing oleh Hazairin Zubair dan Rahmadanih).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami bentuk partisipasi masyarakat; (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat; (3) menganalisis dampak sosial ekonomi; dan (4) merumuskan rancangan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri menunjukkan partisipasi yang sangat aktif. Faktor pendorong partisipasi masyarakat antara lain kemauan, kemampuan, status kepemilikan lahan, hubungan interaksi antarwarga dan eratnya rasa persatuan. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain sarana dan prasana yang kurang memadai, kurangnya dukungan pemerintah dan keterbatasan waktu. Penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat namun tidak terlalu berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Peneliti juga menemukan dampak lain yaitu harga lahan yang semakin meningkat. Arah program yang peneliti susun sebagai saran untuk pemerintah agar penataan lebih maksimal.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Permukiman kumuh, Penataan permukiman.



## ABSTRACT

**IKRAM MUBARAK DJODDING, 2020.** *Community Participation in the Management of Slums in Bontoduri Village Tamalate Subdistrict Makassar City (guided by Hazairin Zubair and Rahmadanih).*

*This study aims to (1) understand forms of community participation; (2) analyzing supporting and inhibiting factors of community participation; (3) analyzing the socio-economic impacts; and (4) formulating a program design for increasing community participation in the management of slums in the Bontoduri Village.*

*This research uses a qualitative approach through observation techniques, in-depth interviews and document studies with informants.*

*The results showed that the community in the management of slums in Bontoduri Village shows very active participation. Factors driving community participation include the willingness, ability and status of land ownership. The inhibiting factors of community participation include inadequate facilities and infrastructure, lack of government support and time constraints. The arrangement of slums in the Bontoduri Village greatly impacts the social conditions of the community but does not significantly affect the economic conditions of the community. Researchers also found another impact, namely land prices are increasing. The design of the program that the researchers arranged as a suggestion for the government so that the arrangement is more leverage.*

**KEYWORDS:** *Community Participation; Slums; Settlement Arrangement.*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PRAKATA .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi.....	11
B. Permukiman Kumuh di Perkotaan.....	19
C. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	24
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
E. Kerangka Konsep.....	33

### METODE PENELITIAN



A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Validitas Temuan.....	44
H. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian .....	45
I. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh.....	60
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh.....	72
D. Dampak Sosial Ekonomi Penataan Permukiman Kumuh.....	83
E. Arahan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh .....	90
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas dan Kategori Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.....	5
Tabel 2.1.	Tabel Arnstein .....	17
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	30
Tabel 3.1	Tabel Kelengkapan Metode .....	43
Tabel 3.2.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalate Tahun 2018 .....	48
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kelurahan di Kecamatan Tamalate Tahun 2018 .....	49
Tabel 4.3.	Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .....	50
Tabel 4.4.	Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .....	61
Tabel 4.5.	Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .....	72
Tabel 4.6.	Program Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	77
Tabel 4.7.	Dampak Sosial Ekonomi Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri.....	84
Tabel 4.8.	Identifikasi Aspirasi Masyarakat Mengenai Kebutuhan dan Permasalahan Masyarakat dalam Berpartisipasi di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.....	91
9.	Arahan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontoduri .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015-2017 .....	3
Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep.....	35
Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian .....	37
Gambar 4.1. Kondisi Jalanan yang Sebagian Sudah Rusak .....	52
Gambar 4.2. Kondisi Drainase yang Tersumbat .....	54
Gambar 4.3. Banjir Menggenangi Ruas Jalan Kelurahan Bontoduri.....	54
Gambar 4.4. Analisis Pohon Masalah .....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Informan .....	106
Lampiran 2. Data Partisipan Kegiatan FGD .....	106
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	107
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....	109



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Masalah permukiman kumuh bukanlah hal baru yang dihadapi di Indonesia. Kehadiran permukiman kumuh erat kaitannya dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan infrastrukturnya. Akibatnya, penduduk mencari jalannya sendiri untuk bertahan hidup, antara lain dengan membangun rumah dengan fasilitas yang seadanya (Noegroho, 2019).

Urbanisasi menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan sehingga menimbulkan beragam permasalahan, salah satu diantaranya adalah semakin banyaknya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Penghuni permukiman kumuh adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib. Mereka umumnya tidak memiliki keahlian dan jenjang pendidikan yang cukup untuk bekerja di sektor industri di perkotaan. Mereka hanya bisa memasuki sektor informal dengan penghasilan yang rendah, sehingga tidak mampu mendiami perumahan yang layak (Malau, 2013).

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dengan laju pertumbuhan 1,34 persen per tahun selama tahun 2010-2017. Pertumbuhan ini menimbulkan angka kepadatan penduduk yang terus meningkat, yaitu

penduduk per km<sup>2</sup> pada tahun 2010 menjadi 137 penduduk per km<sup>2</sup> tahun 2017 (BPS, 2018). Keberadaan lingkungan kumuh yang ada harus sedikit demi sedikit diubah menjadi lingkungan perumahan



dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Permukiman kumuh sangat identik dengan wilayah perkotaan.

Migrasi dari perdesaan ke daerah perkotaan menjadi faktor tumbuhnya permukiman kumuh perkotaan. Kesempatan kerja yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu alasan masyarakat perdesaan berpindah ke daerah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 53,3 persen pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat hingga 66,6 persen pada tahun 2035. Akan tetapi, perpindahan yang terus terjadi tersebut belum diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang cukup sesuai kebutuhan.

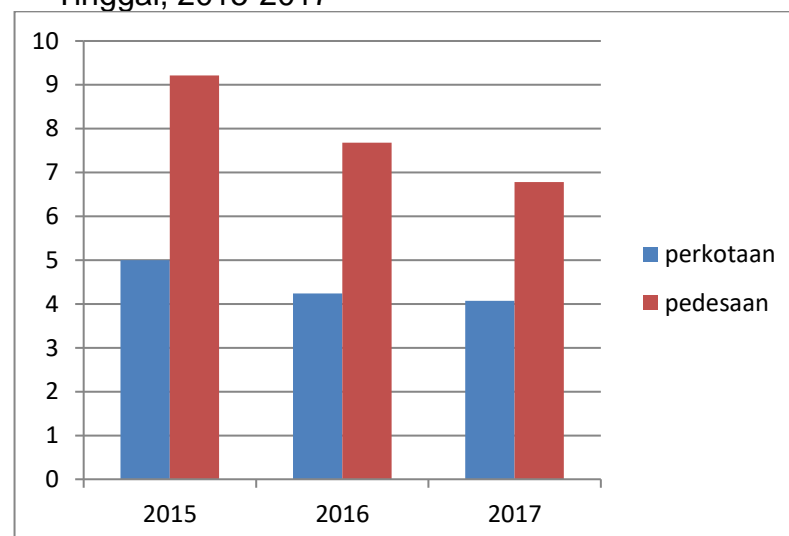
Menurut data Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (2016) dalam Tajuddin (2017), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas lingkungan kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional Tahun 2013, permukiman kumuh di Indonesia tercatat terdapat 38.431 Ha kawasan kumuh di 4.108 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia.



rumah Tangga Kumuh Perkotaan terdiri dari 10,1 persen atau 9,6 juta rumah tangga yang masih membutuhkan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan pelayanan infrastruktur. Selama tahun

2015-2017, persentase rumah tangga kumuh di Indonesia menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya. Persentase rumah tangga kumuh Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,34 persen atau menurun hampir 2 poin dibandingkan dengan tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terus membaik. Penurunan persentase rumah tangga kumuh ini juga terjadi di semua wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Penurunan persentase rumah tangga kumuh ini tentunya didorong dengan kemudahan akses infrastruktur permukiman, seperti pelayanan air minum dan sanitasi layak.

Gambar 1.1. Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2017



Sumber: Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, BPS Indonesia (Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018).

Menurut Sastropetro dalam Solo & Adiwidjaja (2018), sebuah proses

gunan harus melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam gunan maka sangat perlu ketika meningkatkan partisipatif kat dalam proses pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan





yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk dana, partisipasi dalam bentuk material dan partisipasi dalam bentuk informasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan lingkungan kumuh ini melibatkan warga setempat, seperti untuk menjangkau informasi dari masyarakat misalnya menjangkau data fisik (luas rumah, luas tanah yang didiami warga, status tanah) maupun non fisik (data kependudukan, mata pencaharian, besaran penghasilah setiap keluarga). Kemudian mengundang warga setempat pada tahap penyusunan program pelaksanaan.

Untuk mewujudkan sebuah permukiman dan lingkungan impian, yang diperlukan bukan hanya program-program namun yang sangat dibutuhkan adalah kepedulian masyarakat yang cerdas dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman masing-masing. Kebersihan dan kreativitas masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesehatan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman. Mengatasi masalah kesehatan lingkungan permukiman sangatlah tidak sulit, swadaya masyarakat dengan hubungan komunitas yang sangat erat akan membentuk suatu institusi warga yang mampu menciptakan permukiman dan lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang.



Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi warga secara kolektif untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dan alternatif terhadap persoalan lingkungan permukiman misalnya rehabilitasi kampung dan penataan kampung. Intinya

adalah melibatkan warga terdampak dalam setiap tahapan proses (Arifin, 2017). Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang disebabkan oleh arus urbanisasi di daerah rural sekitarnya serta tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan bagi permukiman kumuh di Kota Makassar, terutama pinggiran kota. Permasalahan yang sering muncul diantaranya minimnya sanitasi, tempat pembuangan sampah dan drainase.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 secara administratif Kota Makassar berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan dengan luas wilayah 199,26 km<sup>2</sup> (19.926 ha) dan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan sebaran penduduk 8.348 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan dokumen SIAP (*Slum improvement Action Plan*) NUSP-2 Kota Makassar Tahun 2017, dari total wilayah (199,26 km<sup>2</sup>) tersebut terdapat 695,17 ha diantaranya yang tergolong kumuh. Kecamatan Tamalate adalah merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar wilayahnya tergolong kumuh, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Luas dan Kategori Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

No.	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Kategori
1	Jongaya	1,82	Ringan
2	Tanjung Merdeka	18,61	Berat
3	Balang Baru	16,31	Sedang
4	Barombong	32,73	Berat
5	Maccini Sombala	8,53	Ringan
6	Mangasa	18,75	Berat
7	Bongaya	5,72	Ringan
	Mannuruki	4,16	Ringan
	Pa'baeng-baeng	3,57	Ringan
	Parang Tambung	27,79	Berat

Dokumen Peninjauan Kembali dan Update Kawasan Kumuh Kecamatan Tamalate, 2018



Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 10 kelurahan. Adapun kelurahan yang termasuk wilayah kumuh berat yang ada di Kecamatan Tamalate yaitu Kelurahan Barombong, Kelurahan Parang Tambung dan Kelurahan Mangasa. Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 826/653.2/Tahun 2018 Tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate terbagi menjadi tiga kategori yang terdapat dalam tabel 1.1 (Ramadhani & Ismail, 2019).

Bontoduri adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kelurahan ini dimekarkan dari Kelurahan Parang Tambung pada pemekaran daerah di Kota Makassar tahun 2015. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2019, Kelurahan Bontoduri memiliki luas wilayah 1,26 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kelurahan Bontoduri adalah 14.399 jiwa. Kelurahan ini terdiri dari 43 RT dan 7 RW.

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa Kelurahan Bontoduri yang dimekarkan dari Kelurahan Parang Tambung termasuk dalam kategori kawasan kumuh berat sehingga peneliti tertarik menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian. Peneliti juga tertarik pada lokasi penelitian yang merupakan wilayah konflik lahan. Di lokasi penelitian ini terdapat sebuah fenomena unik dimana ada beberapa rumah warga yang terancam digusur yang

aruh pada kepedulian masyarakat untuk menata lingkungan  
ya berdasarkan tinjauan awal peneliti. Masyarakat yang terancam  
an lahan sebanyak ± 800 kepala keluarga. Alasan warga tidak peduli



pada lingkungannya sebelum konflik berakhir karena takut digusur. Semenjak konflik lahan berakhir dan berhasil dimenangkan oleh warga, mereka mulai memiliki kepedulian untuk menata permukimannya karena tidak takut lagi akan digusur. Permukiman yang awalnya kumuh kini berangsur-angsur menjadi permukiman yang layak huni.

Selain itu dari sisi modal sosial, persatuan masyarakat semakin kuat hingga pada penataan permukimannya. Hal tersebut diawali dimana persatuan masyarakat dibangun dari atas dasar keadaan yang sama yakni terancam kehilangan tempat tinggal. Hingga gejala persatuan itu semakin kuat semenjak warga bersama-sama menggalang kekuatan untuk bertahan di tanah yang merupakan hak mereka. persatuan tersebut berlanjut hingga pada kekompakan masyarakat dalam menata lingkungannya. Peneliti menganggap hal tersebut yang menjadi keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik untuk diteliti dengan pertimbangan belum ada publikasi ilmiah yang mengkaji mengenai tema di atas dengan permasalahan konflik lahan di dalamnya.

Penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis ini dianggap mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah. Selain perbedaan pada aspek metode penelitian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi

yang belum pernah dikaji sebelumnya.

dipun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian aranya penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017) serta Solo &



Adiwidjaja (2018) dengan menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni penelitian kualitatif dan dilakukan di lokasi yang berbeda-beda. Disisi lain, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardiantono (2003), (Istiqomah, 2019), Ramadani, dkk. (2018) dan Sujatini (2017) juga mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini namun menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif pada penelitian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

Peneliti juga mengkaji hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang dilakukan oleh Arifin (2017) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh belum berjalan dengan baik akibat kurangnya kesadaran. Disisi lain, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Solo & Adiwidjaja (2018) menunjukkan antusias masyarakat yang sangat baik dalam penataan permukiman kumuh. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menata lingkungannya.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji mengenai **“Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar”**.



## B. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk partisipasi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar?
3. Bagaimana dampak partisipasi dalam penataan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar?
4. Bagaimana bentuk arahan program peningkatan partisipasi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar?

## C. Tujuan penelitian

1. Untuk memahami bentuk partisipasi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat partisipasi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis dampak sosial ekonomi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Untuk merumuskan arahan program peningkatan partisipasi dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi masalah atau kebutuhan



masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara teoritis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya di bidang perencanaan dan pengembangan wilayah.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian perencanaan dan pengembangan wilayah pada umumnya, serta teori penataan permukiman kumuh di wilayah perkotaan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan kontribusi bagi masyarakat agar mampu memahami tentang penataan permukiman kumuh.

###### b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktik dan dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya terkhusus mahasiswa perencanaan pengembangan wilayah untuk mengkaji lebih dalam tentang penataan

permukiman kumuh perkotaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Partisipasi

##### 1. Pengertian partisipasi

Kata partisipasi diambil dari bahasa Inggris *participation*, yang berarti keikutsertaan. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* disebutkan bahwa *participation means (action of) participating*, sedang *participate means to take part or become involved*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan dan peran serta.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (Banteng, 2015). Pengertian partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis dalam Warjio & Sigalingging (2014), mengemukakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001) dalam Purnamasari (2008) menyatakan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan

kehidupan dan lingkungan mereka. Komisi Ekonomi untuk Amerika (1982) dalam Nikkiah (2009), mendefinisikan partisipasi sebagai kontribusi sukarela oleh orang dalam satu atau beberapa program publik





yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan nasional.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Nikkiah (2009), partisipasi termasuk keterlibatan orang dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan program, manfaat program pembangunan dan upaya untuk mengevaluasi program tersebut. Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport dalam Warjio & Sigalingging (2014), menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
- c. Adanya unsur tanggung jawab.

Pengertian diatas mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi.

Definisi Masyarakat

Definisi masyarakat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat



oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Paul B Horton dan C. Hunt dalam (Akhmaddhian & Fathanudien, 2015), masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Emile Durkheim dalam Tejokusumo (2014), mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sistem sosial yang saling berhubungan dan menjadikan bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bermukim di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

### 3. Bentuk dan jenis partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat atau bahkan penolakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada

pelaksanaan, tetapi mulai dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan (Rorong, dkk., 2017).

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2013) membedakan



partisipasi menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Dua pendekatan dalam SPPN adalah perencanaan pembangunan partisipatif atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) partisipatif. Pendekatan jenis kedua bermaksud untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Suroso, dkk., 2014).

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana



yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi yang diperinci dalam jenis-jenis partisipasi menurut rumusan Direktur Jendral Pengembangan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006) dalam Prihatini (2009) adalah sebagai berikut.

a. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi disini memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok masyarakat itu turut serta menyumbangkan ide-ide bagi pembangunan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan anjang sono, rapat desa dan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa.

Partisipasi Tenaga dan Fisik

Partisipasi yang bersifat aktif yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan



pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat desa perkembangan peran serta tenaga dan fisik ini tampak pada pekerjaan gotong royong dalam perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, pendidikan dan sebagainya.

c. Partisipasi Ketrampilan dan Kemahiran

Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran dan ketrampilan yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan desanya. Misalnya dalam kegiatan peringatan hari Kemerdekaan, warga desa mengerahkan masyarakatnya yang memiliki kemampuan dalam seni untuk menghias dan menata desa dengan sebaik dan seindah mungkin.

d. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi yang dilakukan warga masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa barang maupun benda. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tidak mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan. Tidak bisanya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di desa biasanya karena sudah uzur, sedang sakit atau sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Contohnya menyumbang makanan untuk masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong, memberikan sumbangan berupa makanan, minuman

atau uang.

Dari uraian jenis dan bentuk partisipasi masyarakat di atas, sudah menjelaskan keterlibatan masyarakat di dalam menata permukiman



kumuh dan sudah mampu menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

#### 4. Tingkatan partisipasi masyarakat

Mahjabeen et.al (2008) dalam Noegroho (2019) mengutip artikel Arnstein yang ditulis tahun 1969. Tabel Arnstein menjelaskan derajat tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya dalam perencanaan, pelaksanaan serta *social control*.

Tabel. 2.1. Tabel Arnstein

<i>Degrees of Citizen Power</i>	8. <i>Citizen Control</i>	<i>Citizens obtain the majority of decision-making seats, or full managerial power</i>
	7. <i>Delegated Power</i>	<i>Some power is delegated to agency decision-makers as well as to citizens.</i>
	6. <i>Partnership</i>	<i>Citizens are enabled to negotiate and engage in tradeoffs with traditional power holders.</i>
<i>Degrees of Tokenism</i>	5. <i>Placation</i>	<i>A high level of tokenism. Citizens have the right to advise, but no decision making right or power.</i>
	4. <i>Consultation</i>	<i>Citizens may hear and be heard, but they have no power to ensure that their views will be considered by decision-makers</i>
	3. <i>Informing</i>	<i>Citizens may voice opinions, but have no influence to ensure follow-through or assurance of changing the decision.</i>
<i>No Participation</i>	2. <i>Theraphy</i>	<i>Non-participation, where holders attempt to educate or 'cure' citizens of their ignorance on a particular issue</i>
	1. <i>Manipulation</i>	<i>Highest level of nonparticipation, where power holders do not enable people to actively participate</i>

Menurut Sherry R Arnstein dalam Noegroho (2019) kita dapat mengukur derajat keterlibatan masyarakat dengan melihat tabel di atas urutan terbawah. Berikut uraian penjelasannya:



- a. Tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy* lebih pada sosialisasi informasi pekerjaan apa yang akan dilaksanakan tanpa memberi peluang masyarakat untuk terlibat.
  - b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*. suatu tingkat partisipasi yang mulai melibatkan masyarakat namun tidak memberi kekuatan untuk memberi keputusan.
  - c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*. Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan.
5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program. Menurut Dorodjatun dalam Deviyanti (2013), timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Deviyanti (2013), mengatakan bahwa beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya perubahan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat



tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini dapat dikatakan *stakeholder*, yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. *Stakeholder* adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

## B. Permukiman kumuh perkotaan

### 1. Pengertian permukiman kumuh



Dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas



umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Terlebih dahulu perlu dibedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sastra & Marlina (2006) dalam Dzulqarnain (2018), secara umum dapat dikatakan bahwa suatu wilayah dikategorisasikan sebagai kota dan yang belum memiliki ciri di bawah ini digolongkan sebagai wilayah pedesaan.

- a. Mempunyai luasan yang cukup
- b. Penggunaan lahan didominasi oleh bangunan maupun infrastruktur,
- c. Memiliki kepadatan yang cukup tinggi

Menurut Wimardana dan Setiawan (2016) dalam Dzulqarnain (2018), kenaikan laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak pada tingginya akses terhadap kebutuhan-kebutuhan primer salah satunya adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya permukiman kumuh. Pengertian permukiman kumuh dijelaskan dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh sangat identik dengan wilayah perkotaan.

Perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan menjadi faktor tumbuhnya permukiman kumuh perkotaan. Kesempatan kerja yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu alasan masyarakat



perdesaan berpindah ke daerah perkotaan. Akan tetapi, perpindahan yang terus terjadi tersebut belum diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang cukup sesuai kebutuhan. Beberapa pakar memiliki definisi yang beragam mengenai permukiman kumuh, tergantung dari aspek sudut pandang pakar atau ahli dalam memandang penyebab permasalahan kekumuhan.

Menurut Haryanto (2006) dalam Dzulqarnain (2018), permukiman kumuh adalah kondisi hunian masyarakat di permukiman tersebut sangat buruk, rumah dan sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku. OED (*The Oxford Encyclopedic Dictionary*) menyediakan dua definisi mengenai permukiman kumuh. Pertama, permukiman kumuh diartikan sebagai jalan belakang yang padat dan kumuh biasanya terdapat di kota dan dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Kedua, permukiman kumuh diartikan rumah atau bangunan yang tidak layak untuk tempat tinggal manusia (Gilbert, 2007). Beberapa faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh di perkotaan menurut Basri dkk. (2010) dalam Tajuddin (2017) yaitu:

- a. Arus urbanisasi penduduk
- b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
- c. Kondisi sosial budaya masyarakat
- d. Karakteristik fisik alami

Karakteristik permukiman kumuh

Karakteristik permukiman kumuh adalah ciri dan fisik permukiman berada dalam satu lingkungan dengan kondisi yang kurang layak



bagi kesehatan dan kesejahteraan permukimannya, menggunakan 7 indikator sesuai dengan Permen PUPR No.2 Tahun 2016. Menurut Rebecca, karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan dan kerapatan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan dan saluran drainase yang tidak memadai sehingga secara berkala mengalami banjir (Tajuddin, 2017).

Masrun (2009) dalam Arifin (2017) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan. Menurut Sinulingga (2005) dalam Arifin (2017), ciri-ciri permukiman kumuh terdiri dari :

- a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha.
- b. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalanjalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
- c. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim dan ada yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah.
- d. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air

umur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.

ata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak sangat darurat.



- f. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

### 3. Penataan Permukiman Kumuh

Kegiatan penataan lingkungan kumuh menerapkan konsep dasar Tridaya yang meliputi aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat. Dalam penerapannya, kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pada setiap tahapan, langkah dan proses kegiatan yang berarti masyarakat adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di luar masyarakat merupakan mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung yang berpartisipasi pada kegiatan masyarakat (Beddu & Yahya, 2005).

Strategi kegiatan ini menitikberatkan pada transformasi kapasitas manajemen dan teknis kepada komunitas melalui pembelajaran langsung melalui proses fasilitas berfungsinya manajemen komunitas. Penerapan strategi ini memungkinkan masyarakat untuk mampu membuat rencana yang rasional, membuat keputusan, melaksanakan rencana dan keputusan yang diambil, mengelola dan mempertanggungjawabkan hasil-

kegiatannya, serta mampu mengembangkan produk yang telah dihasilkan. Melalui penerapan strategi ini diharapkan terjadi peningkatan bertahap kapasitas sumber daya manusia dan pranata sosial



masyarakat, kualitas permukiman dan kapasitas ekonomi atau usaha masyarakat (Beddu & Yahya, 2005).

Seluruh rangkaian kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam program penataan lingkungan kumuh ini memiliki pola dasar yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar kegiatan fasilitasi yaitu pengorganisasian dan peningkatan kapasitas masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta pengembangan kelembagaan komunitas. Berikut metode-metode dalam penataan permukiman kumuh menurut Beddu & Yahya (2005).

- a. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada dan memungkinkan dilakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarna yang telah ada.
- b. Pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.
- c. Pemugaran lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan atau bangunan.
- d. Peremajaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi.



### **Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat**

dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia mengalami perubahan sosial. Menurut MacIver dalam Istiqomah (2019), perubahan

perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Kemudian menurut Gillin dan Gillin dalam Istiqomah (2019), perubahan sosial merupakan sebuah variasi dari cara cara manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang terjadi karena adanya perubahan dalam kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi, dan adanya penemuan penemuan dalam masyarakat.

Perubahan sosial dapat dipengaruhi baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat antara lain perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan baru, terjadi pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi, peperangan, adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Menurut Himes dan Moore dalam Istiqomah (2019), perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

#### 1. Dimensi Struktural

Perubahan sosial dilihat dari dimensi struktural mengacu pada bentuk struktur masyarakat yang terkait dengan perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan struktur kelas sosial, dan dua perubahan dalam lembaga sosial. Struktur masyarakat dibentuk oleh unsur yaitu status dan peranan.

#### 2. Dimensi Kultural

Kultur dapat diartikan sebagai budaya. Perubahan kultural yang terjadi pada relokasi terkait juga dengan perubahan struktural. Perubahan sosial dalam dimensi kultural adalah perubahan yang terjadi pada nilai



yaitu suatu konsep abstrak mengenai keyakinan, pemikiran pandangan dan juga perilaku masyarakat.

### 3. Dimensi Interaksional

Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack dalam Istiqomah (2019), interaksi sosial merupakan hal utama dari sebuah kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan tercipta kehidupan bersama. Kehidupan sosial akan terjadi ketika antar individu melakukan kerja sama dan saling berbicara untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Gillin dan Gillin dalam Istiqomah (2019), interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dimana melibatkan hubungan antara orang perorangan, kelompok manusia, maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Berikut ini merupakan rincian dari masing masing bentuk interaksi sosial:

#### a. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif

- 1) Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.
- 2) Akomodasi merupakan proses sosial yang menunjuk pada upaya yang dilakukan manusia untuk meredakan pertentangan atau untuk mencapai suatu keseimbangan.

Asimilasi ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada, baik antar individu maupun antar kelompok guna memperoleh tujuan bersama.



b. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif

- 1) Persaingan merupakan bentuk proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan dengan cara kompetitif.
- 2) Kontroversi adalah bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik. Kontroversi ditandai dengan sikap tidak senang terhadap orang lain atau suatu kelompok, baik secara sembunyi maupun terang terangan.
- 3) Konflik merupakan suatu proses sosial antar individu atau antar kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Pengembangan interaksi sosial dapat berkontribusi pada kegiatan dan nilai ekonomi kegiatan tersebut bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk selanjutnya dikonsumsi masyarakat. Menurut George Soul (1991) dalam Istiqomah (2019), ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Abraham Maslow dalam Istiqomah (2019), kebutuhan manusia terdiri dari lima tingkatan, yaitu:

kat 5: aktualisasi atau realisasi diri dengan indikator psikologis  
 ba keinginan mengembangkan diri secara optimal melalui usaha  
 diri, kreatifitas, dan ekspresi





2. Tingkat 4: rasa hormat dengan indikator psikologis berupa menerima keberhasilan diri, kompetensi, keyakinan, rasa diterima orang lain, apresiasi, rekognisi, dan dignitas atau martabat
3. Tingkat 3: rasa disertakan, rasa cinta dan aktifitas sosial dengan indikator psikologis berupa rasa bahagia berkumpul dan berserikat, perasaan diterima dalam kelompok, rasa bersahabat, dan afeksi
4. Tingkat 2: rasa aman dengan indikator psikologis berupa terhindar dari bahaya dan bebas dari rasa takut atau terancam
5. Tingkat 1: fisik atau biologis dengan indikator lapar, haus, seks, rasa nyaman, tidur, istirahat

Menurut Soehandono dalam Istiqomah (2019), dalam rangka memenuhi kebutuhan, setiap keluarga akan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut terdiri dari beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota keluarga yang bekerja
2. Status pekerjaan dari yang paling menunjang
3. Jenis pekerjaan dari yang paling menunjang
4. Kepemilikan aset
5. Jumlah penghasilan perbulan
6. Ketergantungan terhadap pemberian atau kiriman
7. Mengalami kesulitan makan apabila anggota keluarga yang menunjang

lupan sehari hari tidak bekerja selama seminggu

edia apabila ada pekerjaan sementara dengan upah Rp5000/ hari

ah anggota keluarga laki laki usia  $\geq 15$  tahun yang mencari kerja



10. Jumlah anggota keluarga perempuan usia  $\geq 15$  tahun yang mencari pekerjaan

11. Pernah ada usaha bangkrut sejak terjadinya krisis ekonomi

Melly G. Tan dalam Istiqomah (2019) menjelaskan bahwa kedudukan sosial ekonomi seseorang mencakup tiga faktor, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Menurut Abdulsyani (1994) dalam Istiqomah (2019), kedudukan sosial ekonomi individu dalam masyarakat dapat dilihat dari aktifitas ekonomi, pendapatan, pendidikan, jenis rumah tinggal, jabatan dalam organisasi dan sisi konsumsi, yaitu dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, indikator yang digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat sebagai dampak dari penataan permukiman kumuh di lokasi penelitian adalah pola interaksi sosial dalam hal ini kerja sama dan persaingan antar masyarakat. Selain itu, indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat sebagai dampak dari penataan permukiman kumuh di lokasi penelitian adalah tingkat pendapatan masyarakat.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun 7 penelitian terdahulu yang relevan dari berbagai kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini “Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan

e, Kota Makassar”. Penelitian tersebut tetap memiliki persamaan dan an. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai



Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NAMA PENULIS	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Arifin, 2017	Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang	Metode analisis deskriptif kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik	1. Metode analisis 2. Tujuan penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Fenomena unik terkait konflik lahan
Deviyanti, 2013	Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah	Metode analisis deskriptif pendekatan kualitatif	Partisipasi masyarakat belum optimal karena realisasi pembangunan dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat	1. Metode analisis 2. Tujuan penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Fenomena unik terkait konflik lahan
Solo & Adiwidjaja, 2018	Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kampung Warna-warni Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang	Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh	Metode analisis kualitatif	Partisipasi masyarakat di Kelurahan Jodipan sangat baik. Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan Jodipan ialah pendidikan dan kesehatan masyarakat.	1. Metode analisis 2. Tujuan penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Fenomena unik terkait konflik lahan
Kasma & Sudaryanto, 2019	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi perbandingan desa terdekat (Desa Assorajang) dan Desa Terjauh (Desa Ongkoe) dari Ibukota Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)	untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan alasan yang membedakan partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut.	Metode analisis kualitatif	Bentuk partisipasi masyarakat sangat baik dalam pembangunan desa yaitu pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan dan pada tahap pengawasan	1. Metode analisis 2. Tujuan penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Fenomena unik terkait konflik lahan
Mardiantono, 2003	Identifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dan saluran lingkungan permukiman kumuh di Kota Semarang	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dan saluran lingkungan di permukiman kumuh serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut	Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan alat analisis tabulasi silang	Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi sedang, atau pada skala Arnstein berada antara tingkat ke 5 yaitu penentrang (placation) dan tingkat ke 6 yaitu kemitraan (partnership)	1. Tujuan penelitian 2. Kajian tingkatan partisipasi Arnstein	1. Metode analisis 2. Lokasi penelitian 3. Fenomena unik terkait konflik lahan



NAMA PENULIS	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Istiqomah, 2019	Dampak relokasi permukiman kumuh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat	Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca relokasi pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di rumah susun Jatinegara Barat	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan keluarga di rumah susun Jatinegara Barat. Interaksi sosial antar warga setelah direlokasi masyarakat menjadi individual dibandingkan sebelum direlokasi	Tujuan penelitian (dampak sosial ekonomi penataan permukiman)	1. Metode analisis penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Fenomena unik terkait konflik lahan
Ramadani, dkk., 2018	Peningkatan partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama Kota Malang	Untuk mengetahui peningkatan partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Kotalama berdasarkan keinginan untuk ikutserta dalam partisipasi pada saat yang akan mendatang	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Peningkatan partisipasi masyarakat tertinggi pada bentuk partisipasi terdapat pada aspek jalan lingkungan, sedangkan peningkatan partisipasi masyarakat tertinggi pada tingkat partisipasi terdapat pada aspek pengelolaan persampahan		1. Metode analisis penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Fenomena unik terkait konflik lahan



Dari uraian penelitian terdahulu di atas, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang belum pernah dikaji sebelumnya. Disamping itu, lokasi penelitian ini terdapat sebuah fenomena dimana ada beberapa rumah warga yang terancam digusur yang berpengaruh pada kepedulian masyarakat dalam menata lingkungan sekitarnya berdasarkan tinjauan awal peneliti.

Alasan warga tidak peduli pada lingkungannya sebelum konflik berakhir karena takut digusur. Semenjak konflik lahan berakhir dan berhasil dimenangkan oleh warga, mereka mulai memiliki kepedulian untuk menata permukimannya karena tidak takut lagi akan digusur. Permukiman yang awalnya kumuh kini berangsur-angsur menjadi permukiman yang layak huni.

Selain itu dari sisi modal sosial, persatuan masyarakat semakin kuat hingga pada penataan permukimannya. Hal tersebut diawali dimana persatuan masyarakat dibangun dari atas dasar keadaan yang sama yakni terancam kehilangan tempat tinggal. Hingga gejala persatuan itu semakin kuat semenjak warga bersama-sama menggalang kekuatan untuk bertahan di tanah yang merupakan hak mereka. Persatuan tersebut berlanjut hingga pada kekompakan masyarakat dalam menata lingkungannya.

Peneliti menganggap ini yang menjadi keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan metode analisis penelitian kuantitatif sedangkan pada

ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif. Analisis ini mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di rumusan



## E. Kerangka Konsep

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang disebabkan oleh arus urbanisasi di daerah rural sekitarnya serta tidak seimbang laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan bagi permukiman kumuh di Kota Makassar, terutama pinggiran kota. Permasalahan yang sering muncul diantaranya minimnya sanitasi, tempat pembuangan sampah, drainase, serta rentannya terjadi konflik lahan.

Dalam pembangunan sangat di pandang perlu pada keterlibatan masyarakat disetiap pelaksanaan pembangunan termasuk dalam menata, menjaga dan merawat tempat tinggal sehingga melahirkan permukiman yang layak huni. Partisipasi dibagi menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.

Dalam penelitian ini akan diidentifikasi pula faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi dalam penataan permukiman kumuh. Faktor-faktor pendukung dapat dijadikan acuan untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat sedangkan dari faktor penghambat dapat ditemukan hal-hal yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, permasalahan dan kebutuhan masyarakat diidentifikasi melalui faktor penghambat partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan aspek bangunan dan infrastruktur. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk diakomodasi dalam

program.

alam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia akan mengalami an sosial. Perubahan sosial dapat dipengaruhi baik dari dalam

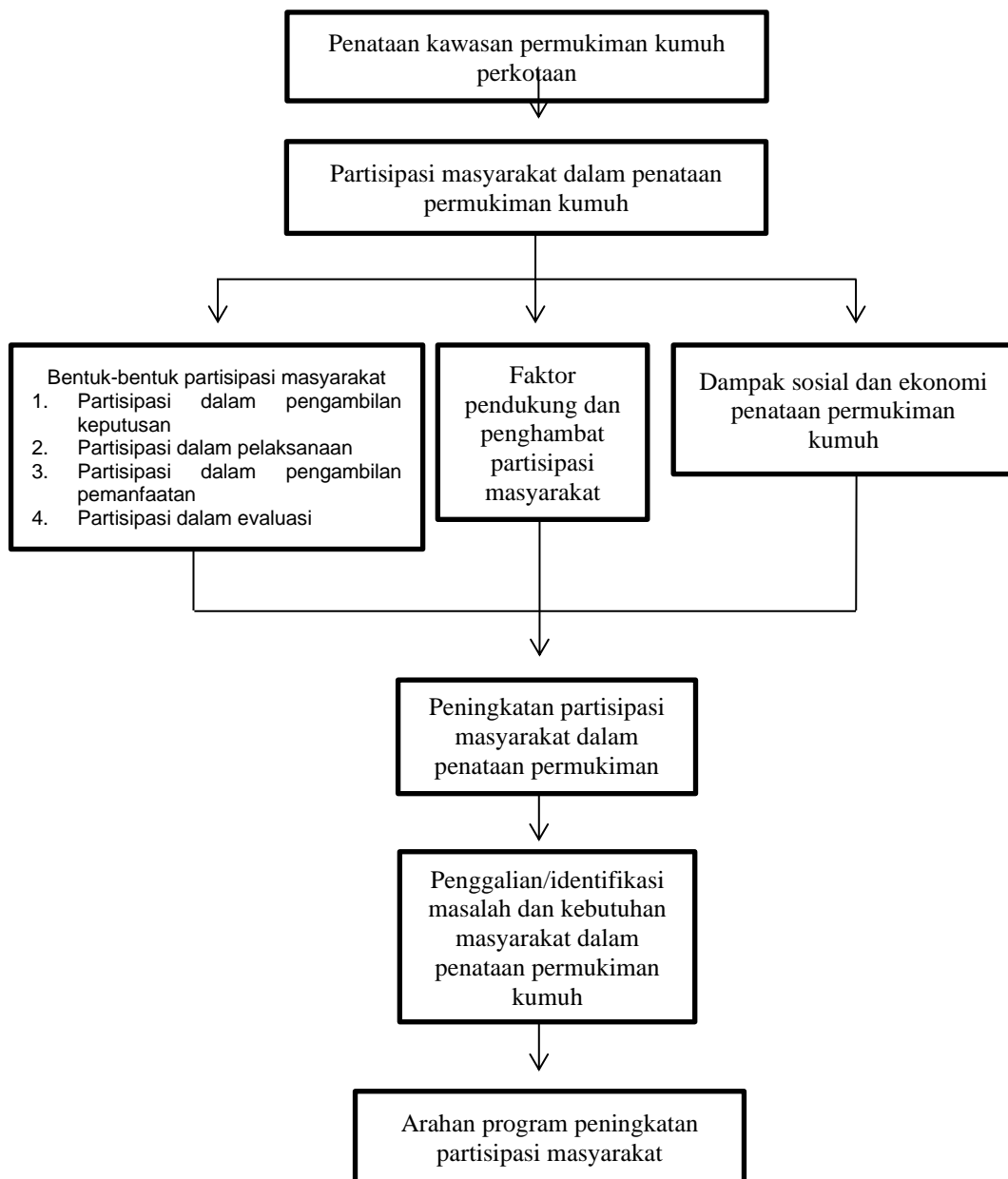


masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Dalam penelitian ini akan dianalisis dampak partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui kegiatan penataan lingkungan tersebut, diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Selain dampak terhadap kondisi sosial, peneliti juga menganalisis dampak partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini dapat menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat menuju perekonomian yang lebih sejahtera.

Keberhasilan penataan permukiman kumuh dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui realisasi aspirasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dituangkan dalam arahan program seperti yang dijelaskan sebelumnya. Melalui arahan program ini, diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah setempat agar dapat memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh. Hasil yang diharapkan dari penataan permukiman kumuh adalah kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran penataan permukiman kumuh menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan pertimbangan pentingnya permukiman layak huni bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan arti sebuah kepedulian lingkungan akan kedewasaan berfikir secara tindakan yang akan melahirkan program yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan yang as. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep

